



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN NERACA PEMBUKA (NERACA AWAL) ENTITAS AKUNTANSI
DAN ENTITAS AKUNTANSI PENGGABUNG PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala SKPD yang terdampak perubahan struktur organisasi agar membuat Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) dan mengoordinasikan penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) UKPD di bawah koordinasinya dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring dan mendorong percepatan pelaksanaan proses serah terima Aset Tetap antar SKPD/UKPD sebagai dampak perubahan struktur organisasi.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) sebagaimana diktum KESATU.

KEEMPAT : Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA.

- KELIMA** : Penyelesaian Penyusunan Neraca Awal SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lambat tanggal 30 November 2017.
- KEENAM** : Kepala SKPD sebagaimana diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2017
Tanggal 19 September 2017

**PROSEDUR PENYUSUNAN NERACA PEMBUKA (NERACA AWAL TAHUN ANGGARAN
2017) ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS AKUNTANSI PENGGABUNG
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

A. Umum :

1. Penyusunan Laporan Keuangan pembuka didasarkan pada Laporan Keuangan Audited TA 2016 sebagai neraca penutup.
2. Penyusunan Laporan Keuangan atau Neraca Pembuka TA 2017 dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap yang dilakukan antar SKPD yang pelaksanaannya di monitoring oleh BPAD sebagaimana format dalam Lampiran Instruksi Gubernur.
3. Penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) dilakukan melalui jurnal mutasi aset dan kewajiban antar SKPD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPKD sebagaimana format jurnal dan kertas kerja terlampir (Format 4 sampai dengan Format 6).

B. Jenis/Tipe Penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017)

1. Penggabungan 2 (dua) SKPD menjadi 1 (satu) SKPD
 - a. pastikan terdapat 2 (dua) Laporan Keuangan SKPD berkenaan Audited TA 2016 disertai dengan lampiran pendukung lainnya (Kartu Inventaris Barang (KIB), data Persediaan akhir (Stock Opname), data Piutang dan data Hutang);
 - b. masing-masing aset dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Neraca Penutup sebagaimana pada butir a di atas digabungkan dalam kertas kerja penyusunan Neraca Awal (Format 4) dengan tetap memberikan identifikasi asal mula sebelum dilakukan penggabungan;
 - c. untuk proses penggabungan angka aset tetap di Neraca dan penggabungan rincian aset dalam KIB, SKPD wajib melengkapi lampiran dan rincian aset yang akan dilakukan penggabungan terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencocokan kesesuaian angka aset tetap dengan Laporan Keuangan TA 2016 Audited oleh BPAD;
 - d. untuk proses penggabungan angka selain aset tetap di Neraca dan penggabungan rinciannya terlebih dahulu dilakukan verifikasi angka/jumlah oleh BPKD;
 - e. seluruh tahapan proses mutasi aset dan kewajiban antar SKPD dan penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) dituangkan dalam Berita Acara Laporan Keuangan Pembuka (Format 2) sesuai dengan format terlampir; dan
 - f. seluruh dokumen Laporan Keuangan Penutup, BAST (Format 1), kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pembuka (Format 4), Laporan Keuangan Pembuka beserta rinciannya di dokumentasikan menjadi satu kesatuan dokumen.
2. Pemisahan/Pemecahan SKPD
 - a. pastikan Laporan Keuangan SKPD berkenaan Audited TA 2016 disertai dengan lampiran pendukung lainnya (Kartu Inventaris Barang (KIB), data Persediaan akhir (Stock Opname), data Piutang dan data Hutang);

- b. dalam rangka pemisahan SKPD/UKPD dibuatkan BAST Aset dan Kewajiban (Format 1) yang ditandatangani oleh 2 kepala SKPD yang mengalami pemisahan.
 - c. untuk proses pembagian aset tetap pada SKPD TA 2017 dan rincian aset dalam KIB, SKPD awal TA 2016 terlebih dahulu melengkapi lampiran dan rincian aset yang akan dilakukan pembagian, selanjutnya dilakukan pencocokan kesesuaian angka aset tetap dengan Laporan Keuangan TA 2016 Audited oleh BPAD;
 - d. untuk proses pemecahan angka selain aset tetap di Neraca dan pemisahan rinciannya terlebih dahulu dilakukan verifikasi angka/jumlah oleh BPKD;
 - e. seluruh tahapan proses mutasi aset dan kewajiban SKPD dan penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) dituangkan dalam Berita Acara Laporan Keuangan Pembuka sesuai dengan format terlampir (Format 3); dan
 - f. seluruh dokumen Laporan Keuangan Penutup, BAST (Format 1), kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pembuka (Format 5 dan Format 6), Laporan Keuangan Pembuka beserta rinciannya di dokumetasikan menjadi satu kesatuan dokumen.
3. Pengalihan tugas dan fungsi sebagian
- a. dalam pengalihan tugas dan fungsi sebagian dapat terjadi seperti contohnya satu bidang dari SKPD A TA 2016 dipisah menjadi bagian dari SKPD B TA 2017;
 - b. untuk SKPD TA 2016 yang sebelumnya memiliki bidang yang dilebur, maka dibuatkan BAST (Format 1) pemisahan Aset dan Kewajiban atas bidang tersebut;
 - c. untuk proses pembagian aset tetap pada SKPD TA 2017 dan rincian aset dalam KIB, SKPD awal TA 2016 terlebih dahulu melengkapi lampiran dan rincian aset yang akan dilakukan pembagian, selanjutnya dilakukan pencocokan kesesuaian angka aset tetap dengan Laporan Keuangan TA 2016 Audited oleh BPAD;
 - d. untuk proses pemecahan angka selain aset tetap di Neraca dan pemisahan rinciannya terlebih dahulu dilakukan verifikasi angka/jumlah oleh BPKD;
 - e. seluruh tahapan proses mutasi aset dan kewajiban serta penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal Tahun Anggaran 2017) SKPD dengan bidang yang dilebur dituangkan dalam Berita Acara Laporan Keuangan Pembuka sesuai dengan format terlampir (Format 2); dan
 - f. seluruh dokumen Laporan Keuangan Penutup, BAST (Format 1), kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pembuka (Format 4 dan Format 5), Laporan Keuangan Pembuka beserta rinciannya didokumentasikan menjadi satu kesatuan dokumen.
4. Perubahan Nomenklatur

Penyusunan Laporan Keuangan Pembuka didasarkan pada Laporan Keuangan Audited TA 2016 dengan diganti nama SKPD dengan nama SKPD TA 2017.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Kota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat



KOP Surat SKPD A
(SKPD TA 2017 Hasil perubahan Struktur Organisasi)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR

Pada hari ini tanggal..... bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan serah terima saldo akun Laporan Keuangan(nama SKPD)..... Hasil Audit BPK RI Tahun 2016 kepada(nama SKPD)..... dengan rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan :

Yang Menerima :

Pihak Pertama
 Kepala SKPD,

Pihak Kedua
 Kepala SKPD,

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah,

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah,

Heru Budi Hartono
 NIP 196512131993031006

Achmad Firdaus
 NIP 196405121987031004



KOP Surat SKPD C
(SKPD TA 2017 hasil penggabungan dari SKPD A & SKPD B)

BERITA ACARA LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan penggabungan**(SKPD A)**..... dan**(SKPD B)**..... menjadi**(SKPD C)**..... dengan Laporan Keuangan Pembuka SKPD C disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD C),

Nama

NIP

Nomor 112 TAHUN 2017
Tanggal 19 September 2017

URAIAN AKUN	1 Januari 2017
ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas dan Setara Kas BLUD Piutang Pajak Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Piutang BLUD Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya Aset Lancar Lainnya Belanja Dibayar di Muka Uang Muka Kerja Persediaan	
JUMLAH ASET LANCAR	
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
JUMLAH ASET TETAP	
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Aset Belum Validasi Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset Lain-Lain BLUD Kas Dikonsinyasikan Aset Fasos dan Fasum Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	
JUMLAH ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	

URAIAN AKUN	1 Januari 2017
KEWAJIBAN Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima di Muka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
JUMLAH KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	



**KOP Surat SKPD Y
(SKPD TA 2017 hasil pemisahan SKPD Y)**

BERITA ACARA LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan pemisahan(SKPD X).....menjadi dua SKPD yakni(SKPD Y).....dan(SKPD Z)..... dengan Laporan Keuangan Pembuka(SKPD Y) atau (SKPD Z)..... disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD X),

Nama
 NIP

Catatan :
 Kedua SKPD TA 2017 (Hasil Pemisahan dari SKPD X) dalam hal ini SKPD Y dan SKPD Z, masing-masing membuat Berita Acara Laporan Keuangan Pembuka.

Lampiran : Berita Acara Laporan Keuangan Pembuka

Nomor 112 TAHUN 2017
 Tanggal 19 September 2017

URAIAN AKUN	1 Januari 2017
<p>ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas dan Setara Kas BLUD Piutang Pajak Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Piutang BLUD Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya</p> <p>Aset Lancar Lainnya Belanja Dibayar di Muka Uang Muka Kerja Persediaan</p>	
JUMLAH ASET LANCAR	
<p>ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p>	
JUMLAH ASET TETAP	
<p>ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Aset Belum Validasi Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset Lain-Lain BLUD Kas Dikonsinyasikan Aset Fasos dan Fasum Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta</p>	
JUMLAH ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	

URAIAN AKUN	1 Januari 2017
KEWAJIBAN Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima di Muka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
JUMLAH KEWAJIBAN	
EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

**KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMBUKA-PENGGABUNGAN SKPD
(SKPD C)
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2016	Neraca Pembuka
		(AUDITED) SKPD A	(AUDITED) SKPD B	SKPD C
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas	-	-	-
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	-	-	-
1.1.1.01.01	Kas Daerah	-	-	-
1.1.1.01.02	Potongan Pajak dan Jamsostek	-	-	-
1.1.1.01.03	Kas Transitoris	-	-	-
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
1.1.1.02.01	Pendapatan yang Belum Disetor	-	-	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
1.1.1.03.01	Sisa Uang Persediaan	-	-	-
1.1.1.03.01.001	Sisa Belanja UP/GU	-	-	-
1.1.1.03.01.002	Sisa Belanja TU	-	-	-
1.1.1.03.01.003	Sisa Belanja LS	-	-	-
1.1.1.03.02	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	-	-	-
1.1.1.03.03	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	-	-	-
1.1.1.03.04	Uang Titipan	-	-	-
1.1.1.03.05	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	-	-	-
1.1.1.04	Kas dan Setara Kas BLUD	-	-	-
1.1.1.04.01	Kas Tunai	-	-	-
1.1.1.04.02	Kas di Bank	-	-	-
1.1.1.04.03	Kas Transitoris BLUD	-	-	-
1.1.1.04.04	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	-	-	-
1.1.1.04.05	Uang Muka Pasien RSUD/K	-	-	-
1.1.1.04.06	Uang Titipan	-	-	-
1.1.1.04.07	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	-	-	-
1.1.3	Piutang	-	-	-
1.1.3.01	Piutang Pajak	-	-	-
1.1.3.01.01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.3.01.02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.3.01.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.3.01.04	Piutang Pajak Air Tanah	-	-	-
1.1.3.01.05	Piutang Pajak Hotel	-	-	-
1.1.3.01.06	Piutang Pajak Restoran	-	-	-
1.1.3.01.07	Piutang Pajak Hiburan	-	-	-
1.1.3.01.08	Piutang Pajak Reklame	-	-	-
1.1.3.01.09	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
1.1.3.01.10	Piutang Pajak Parkir	-	-	-
1.1.3.01.11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
1.1.3.01.12	Piutang Air Permukaan	-	-	-
1.1.3.01.13	Piutang Pajak Rokok	-	-	-
1.1.3.01.14	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-
1.1.3.01.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
1.1.3.01.16	Dst...	-	-	-
1.1.3.02	Piutang Retribusi	-	-	-
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	-	-	-
1.1.3.02.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
1.1.3.02.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
1.1.3.03	Piutang BLUD	-	-	-
1.1.3.03.01	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	-	-	-
1.1.3.03.02	Piutang Hub. Istimewa BLUD Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan (Gakin, SKTM, Gizi Buruk, JPK dan PNS)	-	-	-
1.1.3.03.03	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	-	-	-
1.1.3.03.04	Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	-	-	-
1.1.3.03.05	Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	-	-	-
1.1.3.03.06	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	-	-	-
1.1.3.03.07	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	-	-	-
1.1.3.03.08	Piutang BLUD Pengelola Dana Bergulir	-	-	-
1.1.3.03.09	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	-	-	-
1.1.3.03.10	Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-
1.1.3.03.11	Piutang BLUD Jaminan Kesehatan Daerah	-	-	-
1.1.3.03.12	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	-	-
1.1.3.03.13	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2016	Neraca Pembuka
		(AUDITED) SKPD A	(AUDITED) SKPD B	SKPD C
1.1.3.03.14	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	-	-
1.1.3.03.15	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway	-	-	-
1.1.3.03.16	Piutang BLUD Pengelola ERP	-	-	-
1.1.3.03.17	Dst....	-	-	-
1.1.3.30	Piutang Lainnya	-	-	-
1.1.3.30.01	Piutang Deviden/Kontribusi	-	-	-
1.1.3.30.02	Piutang Jasa Giro	-	-	-
1.1.3.30.03	Piutang Bunga Deposito	-	-	-
1.1.3.30.04	Piutang Sanksi Pajak	-	-	-
1.1.3.30.05	Piutang Denda Retribusi	-	-	-
1.1.3.30.06	Piutang Tunjangan	-	-	-
1.1.3.30.07	Piutang Tagihan Listrik dan Air	-	-	-
1.1.3.30.08	Piutang Sewa	-	-	-
1.1.3.30.09	Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	-	-	-
1.1.3.30.10	Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	-	-	-
1.1.3.30.11	Piutang Sanksi SP3L	-	-	-
1.1.3.30.12	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB	-	-	-
1.1.3.30.13	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	-	-	-
1.1.3.30.14	Piutang Hubungan Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD	-	-	-
1.1.3.30.15	Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	-	-	-
1.1.3.30.16	Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	-	-	-
1.1.4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
1.1.4.01	Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	-	-	-
1.1.4.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.4.01.02	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.4.01.03	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.4.01.04	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	-	-	-
1.1.4.01.05	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	-	-	-
1.1.4.01.06	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	-	-	-
1.1.4.01.07	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	-	-	-
1.1.4.01.08	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	-	-	-
1.1.4.01.09	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
1.1.4.01.10	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	-	-	-
1.1.4.01.11	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
1.1.4.01.12	Penyisihan Piutang Air Permukaan	-	-	-
1.1.4.01.13	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-	-
1.1.4.01.14	Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-
1.1.4.01.15	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
1.1.4.01.16	Dst...	-	-	-
1.1.4.02	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	-	-	-
1.1.4.02.01	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	-	-	-
1.1.4.02.02	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
1.1.4.02.03	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
1.1.4.03	Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih	-	-	-
1.1.4.03.01	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	-	-	-
1.1.4.03.02	Penyisihan Piutang Hub. Istimewa BLUD Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan (Gakin, SKTM, Gizi Buruk, JPK dan PNS)	-	-	-
1.1.4.03.03	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	-	-	-
1.1.4.03.04	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	-	-	-
1.1.4.03.05	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	-	-	-
1.1.4.03.06	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	-	-	-
1.1.4.03.07	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	-	-	-
1.1.4.03.08	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Dana Bergulir	-	-	-
1.1.4.03.09	Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	-	-	-
1.1.4.03.10	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-
1.1.4.03.11	Penyisihan Piutang BLUD Jaminan Kesehatan Daerah	-	-	-
1.1.4.03.12	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	-	-
1.1.4.03.13	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	-	-
1.1.4.03.14	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2016	Neraca Pembuka
		(AUDITED) SKPD A	(AUDITED) SKPD B	SKPD C
1.1.4.03.15	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway	-	-	-
1.1.4.03.16	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola ERP	-	-	-
1.1.4.03.17	Dst.....	-	-	-
1.1.4.30	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya	-	-	-
1.1.4.30.01	Penyisihan Piutang Deviden/Kontribusi	-	-	-
1.1.4.30.12	Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLE	-	-	-
1.1.4.30.03	Penyisihan Piutang Bunga Deposito	-	-	-
1.1.4.30.04	Penyisihan Piutang Sanksi Pajak	-	-	-
1.1.4.30.05	Penyisihan Piutang Denda Retribusi	-	-	-
1.1.4.30.06	Penyisihan Piutang Tunjangan	-	-	-
1.1.4.30.07	Penyisihan Piutang Tagihan Listrik dan Air	-	-	-
1.1.4.30.08	Penyisihan Piutang Sewa	-	-	-
1.1.4.30.09	Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	-	-	-
1.1.4.30.10	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	-	-	-
1.1.4.30.11	Penyisihan Piutang Sanksi SP3L	-	-	-
1.1.4.30.15	Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	-	-	-
1.1.4.30.16	Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	-	-	-
1.1.5	Aset Lancar Lainnya	-	-	-
1.1.5.01	Belanja Dibayar di Muka	-	-	-
1.1.5.01.01	Asuransi Dibayar di muka	-	-	-
1.1.5.01.02	Sewa Dibayar di muka	-	-	-
1.1.5.01.03	BBM Dibayar Dimuka	-	-	-
1.1.5.01.04	Dst...	-	-	-
1.1.5.02	Uang Muka Kerja	-	-	-
1.1.5.02.01	Uang Muka Kerja di SKPD	-	-	-
1.1.5.02.02	Uang Muka Kerja di BLUD	-	-	-
1.1.5.02.03	Dst...	-	-	-
1.1.6	Persediaan	-	-	-
	JUMLAH ASET LANCAR			
1.3	ASET TETAP			
1.3.1	Tanah	-	-	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	JUMLAH ASET TETAP			
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran			
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	-	-	-
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
1.5.2.02	Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	-	-	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud			
1.5.4.1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
1.5.4.2	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
1.5.9	Aset Lain-lain			
1.5.9.01.001	Aset Rusak Berat	-	-	-
1.5.9.01.002	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-	-	-
1.5.9.02	Aset Belum Validasi	-	-	-
1.5.9.03	Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	-	-	-
1.5.9.04	Aset Lain-lain - BLUD	-	-	-
1.5.9.05	Kas Dikonsinyasikan	-	-	-
1.5.9.06	Aset Fasos Fasum	-	-	-
1.5.9.09	Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	-	-	-
1.5.9.11	Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya	-	-	-
1.5.9.12	Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	31 Desember 2016 (AUDITED) SKPD A	31 Desember 2016 (AUDITED) SKPD B	Neraca Pembuka SKPD C
1.5.10	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
1.5.10.03	Akumulasi Penyusutan Kerjasama Operasi (KSO)	-	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	-	-
1.17.01	R/K SKPD	-	-	-
	JUMLAH ASET	-	-	-
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
2.1.1.01	Utang PFK di PPKD	-	-	-
2.1.1.01.01	Utang Taspen	-	-	-
2.1.1.01.02	Utang Askes	-	-	-
2.1.1.01.03	Utang PPh Pusat	-	-	-
2.1.1.01.04	Utang PPN Pusat	-	-	-
2.1.1.01.05	Utang Taperum	-	-	-
2.1.1.01.06	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-
2.1.1.01.07	Utang Potongan Tabungan Hari Tua	-	-	-
2.1.1.02	Utang PFK di SKPD	-	-	-
2.1.1.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
2.1.1.02.02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	-	-	-
2.1.1.02.03	Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-
2.1.1.02.04	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26	-	-	-
2.1.1.02.05	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	-	-	-
2.1.1.02.06	Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-	-	-
2.1.1.02.07	Utang Pemunggutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)	-	-	-
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
2.1.4.10	Pendapatan Pajak Diterima di Muka	-	-	-
2.1.4.09	Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-
2.1.4.08	Pendapatan Retribusi Diterima di Muka	-	-	-
2.1.4.06	Pendapatan Diterima di Muka BLUD	-	-	-
2.1.5	Utang Belanja	-	-	-
2.1.5.01	Utang Belanja Pegawai	-	-	-
2.1.5.02	Utang Belanja TALI	-	-	-
2.1.5.03	Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	-	-	-
2.1.5.04	Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS	-	-	-
2.1.5.04.01	Utang Belanja Hub Istimewa Dinkes kepada Puskesmas dan UPT	-	-	-
2.1.5.04.02	Utang Belanja Hub Istimewa Dinkes kepada RSUD	-	-	-
2.1.5.04.03	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	-	-	-
2.1.5.05	Utang Belanja BLUD	-	-	-
2.1.5.05.01	Utang Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	-	-	-
2.1.5.05.02	Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD	-	-	-
2.1.5.05.03	Utang Belanja BLUD Pengelola Perparkiran	-	-	-
2.1.5.05.04	Utang Belanja BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	-	-	-
2.1.5.05.05	Utang Belanja BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	-	-	-
2.1.5.05.06	Utang Belanja BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	-	-	-
2.1.5.05.07	Utang Belanja BLUD Pengelola Dana Bergulir	-	-	-
2.1.5.05.08	Utang Belanja BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-
2.1.5.05.09	Utang Belanja BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	-	-	-
2.1.5.05.10	Utang Belanja BLUD Jaminan Kesehatan Daerah	-	-	-
2.1.5.05.11	Utang Belanja BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	-	-
2.1.5.05.12	Utang Belanja BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	-	-
2.1.5.05.13	Utang Belanja BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	-	-
2.1.5.05.14	Utang Belanja BLUD Pengelola Transjakarta Busway	-	-	-
2.1.5.05.15	Utang Belanja BLUD Pengelola ERP	-	-	-
2.1.5.06	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	-	-	-
2.1.5.07	Utang Belanja Lainnya	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2016	Neraca Pembuka
		(AUDITED) SKPD A	(AUDITED) SKPD B	SKPD C
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
2.1.6.01	Utang Jaminan	-	-	-
2.1.6.01.01	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	-	-	-
2.1.6.02	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	-	-	-
2.1.6.03	Utang Restitusi Pajak	-	-	-
2.1.6.04	Utang Hub. Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
2.2.3	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-
2.2.3.01	Utang Jangka Panjang di BLUD	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-
3.1	EKUITAS - LO	-	-	-
3.3	RK PPKD	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	-	-	-

Kepala SKPD A,

Kepala SKPD B,

Kepala SKPD C,

Nama Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
NIP

Kepala BPKD,

Kepala BPAD,

Heru Budi Hartono

Achmad Firdaus